

PIAGAM KERJASAMA PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2009-2014

Atas berkat Rahmat Allah SWT, Para penandatangan piagam kerjasama telah sepakat untuk membentuk koalisi berbasis platform dalam Kabinet dan Parlemen periode tahun 2009 – 2014. Koalisi yang dibentuk oleh Para penandatangan piagam ini mempunyai visi, misi dan tujuan bersama untuk mengkonsolidasikan gerakan reformasi guna memperkuat sistem politik demokrasi dan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memastikan agar proses transisi demokrasi segera mengarah pada terwujudnya cita-cita nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam lingkup nasional, Para penandatangan menyadari bahwa reformasi yang telah bergulir 11 tahun pada kenyataannya sampai hari ini belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan rakyat. Para penandatangan sepakat untuk memperkecil jarak antara harapan dengan kenyataan, agar dalam waktu 5 tahun mendatang tidak menjadi potensi kerawanan sosial yang bermuatan perilaku kekerasan secara kolektif. Para penandatangan piagam bersepakat untuk bekerjasama memberikan respon atau jawaban dengan mengutamakan prinsip-prinsip kepedulian dan keberpihakan kepada kepentingan Rakyat Indonesia yang mendambakan dan mengharapkan kepastian hidup dan perbaikan hidup, melalui upaya perjuangan dan pemberdayaan parlemen dan pemerintahan yang bersih, terhormat, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kredibel serta mampu menjalankan fungsi pengendalian dan keseimbangan (*checks and balances*) terhadap suatu pemerintahan terpilih yang didasarkan pada sistim presidensial yang kuat, kompak dan efektif.

Dalam lingkup regional dan internasional sesuai amanat konstitusi, Para penandatangan piagam bersepakat untuk berinisiatif memelopori pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di lingkungan ASEAN, Asia Pasifik, Dunia Islam dan belahan dunia lainnya. Senantiasa konsisten dalam mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang belum merdeka, seperti Palestina, dan negara-negara yang tidak diuntungkan dalam hubungan dan pergaulan internasional.

Semoga Allah SWT memberkati piagam kerjasama ini.

PARTAI DEMOKRAT

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Hadi Utomo
Ketua Umum

Marzuki Alie
Sekretaris Jenderal

Tifatul Sembiring
Presiden

M. Anis Matta
Sekretaris Jenderal

LAMPIRAN PIAGAM KERJASAMA

Kesepakatan Operasional Koalisi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera 2009-2014 Untuk Pemberdayaan Kabinet dan Parlemen

A. Pendahuluan

1. Kesepakatan ini adalah bagian tak terpisahkan dari PIAGAM KERJASAMA PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2009-2014 yang telah ditandatangani oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
2. Kesepakatan ini adalah langkah operasional Koalisi untuk mengkonsolidasikan gerakan reformasi di Kabinet dan Parlemen guna memperkuat sistem politik demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, kompak dan efektif sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, serta memastikan agar proses transisi demokrasi segera berubah mengarah pada terwujudnya cita-cita Nasional, yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945:
 - merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
 - melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

B. Muatan Substansi Kesepakatan di Kabinet

1. Membentuk pemerintahan Presidensial yang kuat, kompak dan efektif.
2. Wakil Presiden dan Para Menteri adalah Pembantu Presiden sebagaimana diatur di dalam ketentuan UUD 1945.
3. Kabinet yang dibentuk oleh Presiden adalah satu kesatuan utuh tim kerja pemerintahan dengan masa jabatan 5 tahun sesuai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menteri diangkat dan diberhentikan atas hak prerogratif Presiden.
5. Loyalitas Menteri hanyalah kepada Presiden. Loyalitas kepada partai hanya jika sejalan dengan garis kebijakan Presiden.
6. Komunikasi Presiden dengan para Menteri adalah komunikasi profesional, bukan komunikasi politik.
7. Menteri tidak boleh merangkap jabatan Ketua Umum Partai Politik.
8. Komunikasi politik dilakukan secara periodik oleh Presiden dengan Partai Peserta Koalisi. Kesepakatan ini dilaksanakan oleh Peserta Koalisi dengan memegang teguh prinsip moralitas dan ketentuan perundang-undangan, serta berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan koalisi sampai akhir masa Pemerintahan pada tahun 2014.

C. Muatan Substansi Kesepakatan di Parlemen

1. Platform partai politik peserta koalisi yaitu Pembangunan, Demokrasi dan Keadilan (*platform based coalition*) menjadi dasar perjuangan Koalisi di Parlemen untuk mewujudkan cita-cita Nasional.
2. Kesepakatan ini dilaksanakan oleh semua anggota Parlemen Partai Peserta Koalisi dengan memegang teguh prinsip moralitas dan ketentuan perundang-undangan, serta berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan koalisi sampai akhir masa Parlemen tahun 2014.
3. Memperkuat ikatan koalisi dengan membentuk Sekretariat bersama fraksi –fraksi dari partai-partai yang berkoalisi dalam Parlemen untuk menyepakati, memperjuangkan dan mengamankan agenda bersama.
4. Mendukung segala kebijakan Pemerintah yang berbasis platform koalisi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Target Kerja Koalisi

1. Memperjuangkan sepuluh agenda mendesak Nasional:
 - a. Di bidang politik:
 - i. Kepemimpinan nasional
Mengusung pemimpin yang visioner, tegas, bersih dan loyal serta membangun sistem dan budaya politik yang kondusif bagi kepentingan bangsa dan negara.
 - ii. Pemberantasan KKN
Mendorong penegakkan hukum yang sungguh-sungguh dan konsisten tanpa pandang bulu. Aparat/lembaga penegak hukum harus memberikan contoh dan keteladanan.
 - iii. Politik nasional
Mendorong tumbuhnya sistem demokrasi dan politik nasional yang dinamis dan stabil guna terciptanya Pemerintahan yang kuat, kompak dan efektif dalam mensejahterakan rakyat, serta memberikan keleluasaan diangkatnya alternatif-alternatif dan solusi keislaman dan kebhinekaan untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.
 - iv. Reformasi birokrasi
Membangun birokrasi yang bersih, peduli dan profesional berbasis meritokrasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Government Governance)
 - v. Otonomi Daerah
Mendorong Otonomi Daerah yang berjalan dengan efektif dan efisien serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Di bidang ekonomi:

- i. Kebijakan ekonomi nasional
Pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri serta berpihak kepada Ekonomi Kerakyatan dalam rangka kesetaraan dan keadilan.
- ii. Kedaulatan pangan, energi, dan air.
Mendorong kemandirian pangan, energi, dan air melalui berbagai program ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi sehingga negara lebih mampu memenuhi hak rakyat atas pangan, energi dan air.
- iii. Kemiskinan dan pengangguran
Mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peluang usaha, kemudahan akses informasi pemasaran dan permodalan serta terciptanya masyarakat yang berdaya kreatif dan mandiri.

c. Di bidang sosial budaya

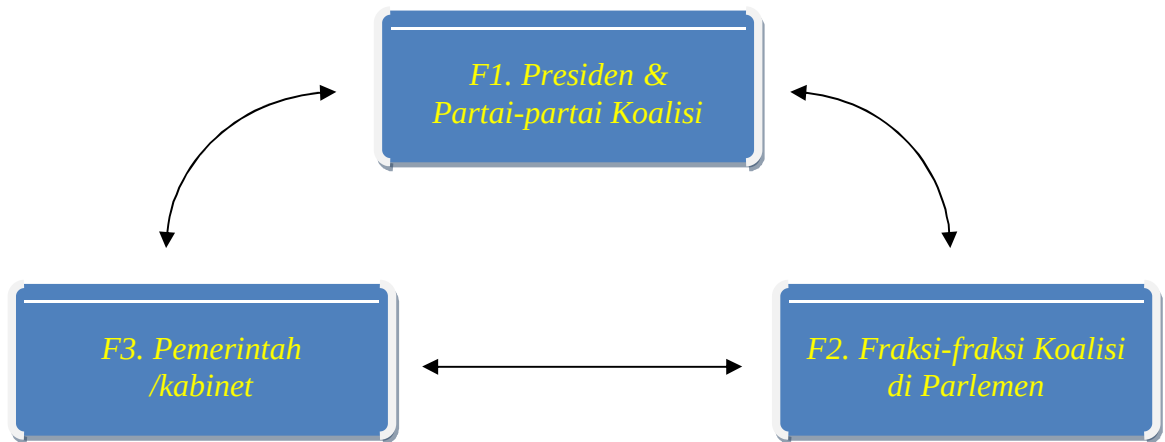
- i. Martabat Bangsa
Membangun moral bangsa dan mendorong penguatan budaya asli bangsa, religius, gotong-royong, IPTEK melalui pendidikan dan gerakan kebudayaan.
- ii. Pendidikan
Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan pendidikan.
- iii. Kesehatan
Mewujudkan sehat paripurna untuk semua melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

2. Agenda Regional dan Internasional

- a. Meningkatkan peran positif Indonesia di ASEAN, Asia Pasifik, OKI dan organisasi-organisasi internasional lainnya atas dasar prinsip kepentingan nasional Indonesia.
- b. Bersungguh-sungguh dalam mencegah tumbuhnya kantong-kantong kekuasaan asing hegemonik di kawasan tanah air, dan mengisolasi kekuatan tersebut jika sudah terlanjur tumbuh.
- c. Membangun kerjasama Internasional dengan azas kesetaraan dan yang dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.
- d. Mendukung upaya percepatan kemerdekaan bangsa Palestina, membuka perwakilan untuk rakyat Palestinan di Indonesia, dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
- e. Tidak memberikan dukungan kepada segala bentuk agresi dan aneksasi dengan alasan apa pun.
- f. Bersikap proaktif dalam misi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
- g. Proaktif dalam memberikan perlindungan dan pembelaan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

- h. Menolak tekanan dan campur tangan asing dalam menangani isu terorisme serta bersikap bijak dalam pelaksanaannya.

E. Mekanisme Komunikasi



Forum-1: Forum dialog partai koalisi, dimana komunikasi politik *strategis* dilaksanakan secara periodik oleh presiden bersama partai-partai koalisi.

Forum-2: Forum dialog *ruling party* di parlemen, dimana komunikasi politik dilakukan antar fraksi partai koalisi dalam rangka mengeksekusi kesepakatan forum koalisi di tingkat parlemen.

Forum-3: Forum pemerintah/kabinet, dimana komunikasi dilakukan reguler presiden dengan para menternya dalam rangka *implementasi* perjuangan mensejahterakan rakyat menuju Cita-Cita Nasional, sesuai kesepakatan forum partai koalisi.

Mekanisme komunikasi yang ditetapkan dalam forum di atas tidak boleh mengganggu posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Jakarta, 9 Mei 2009

PARTAI DEMOKRAT

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Hadi Utomo
Ketua Umum

Marzuki Alie
Sekretaris Jenderal

Tifatul Sembiring
Presiden

M. Anis Matta
Sekretaris Jenderal